



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN KETUA BPK RI
PADA ACARA
PELANTIKAN PEJABAT ESELON 1 TAHUN 2009
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

JAKARTA, 27 JULI 2009

Yang terhormat:

Para Anggota BPK RI,

Para Pejabat di lingkungan BPK RI beserta isteri,

serta Para undangan yang berbahagia.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
dan Salam sejahtera untuk kita semua

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karuniaNya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri upacara Pelantikan Pejabat Eselon I di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

Atas nama BPK dan saya pribadi, saya mengucapkan selamat atas pelantikan saudara:

1. Gatot Supiartono, S.H., M.Acc., Ak., C.F.E., sebagai Auditor Utama Keuangan Negara I;

2. Drs. Johanes Widodo Hario Mumpuni, Ak., M.B.A., sebagai Auditor Utama Keuangan Negara III;
3. Drs. Achmad Sjakir Amir, M.M., sebagai Auditor Utama Keuangan Negara V; serta
4. Drs. Sjafruddin Tasman, sebagai Staf Ahli Bidang Pemeriksaan Investigatif.

Sedangkan kepada pejabat lama, Drs. Soekoyo dan Drs. Djunaedhi Adhie Susanto, M.M., saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan pengabdian dan pemikirannya kepada BPK. Kepada Sdr. Djunaedhi, saya ucapkan selamat berkarya ditempat yang baru. Kepada Saudara Drs. Sukoyo, saya ucapkan selamat memasuki masa purna bhakti dan saya ikut mendoakan semoga anda berhasil dalam proses seleksi Anggota BPK periode 2009-2014 yang akan dilakukan pada akhir bulan ini. Anda adalah merupakan salah seorang Tortama yang memiliki prestasi menonjol selama saya memimpin BPK.

Sementara itu, mulai hari ini, Saudari Prof. Dr. Ilya Avianti, S.E., M.Si., Ak akan menjadi Pelaksana Tugas Auditor Utama Keuangan Negara VII disamping jabatannya sebagai Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD dan Kekayaan Negara/Daerah Yang Dipisahkan.

Hadirin yang saya hormati,

Promosi ataupun mutasi jabatan adalah merupakan bagian dari kebijakan BPK dalam rangka penyegaran di lingkungan pelaksana untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sebagai salah satu *'pilot project'* reformasi birokrasi di Indonesia, BPK dituntut dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan, sistem kerja yang efisien dan efektif. Agar *stakeholders* percaya padanya, BPK harus dapat memberikan contoh dan teladan dalam hal integritas dan profesionalisme pegawai. Sebagaimana telah anda alami sendiri selama masa Orde Baru, tanpa adanya integritas dan kemampuan professional, tidak ada yang akan mau mendengarkan BPK. Pada masa itu, Pemerintah mendirikan berbagai lembaga yang merupakan tandingan BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara.

Pejabat Eselon I memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan berbagai inisiatif untuk mempercepat pembangunan sistem keuangan negara yang sesuai dengan ketiga UU keuangan negara tahun 2003-2004. Para Auditor Utama diharapkan dapat melakukan pembinaan organisasi sesuai tugas, peran, dan fungsinya, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi tugas-tugas bidang pemeriksaan keuangan negara. Salah satu kunci keberhasilan kita selama lima tahun terakhir adalah karena kita telah merubuhkan "*tembok Berlin*" penyekat antar Tortama, maupun antar satuan kerja didalamnya, dan melakukan kerjasama serta koordinasi yang terpadu antar Tortama.

Sementara itu, staf ahli diharapkan dapat membantu tugas-tugas pokok badan dengan memberikan ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang inovatif bagi BPK. Bagi para Auditor Utama yang menjalankan fungsi teknis, keberadaan Staf Ahli dapat dijadikan sebagai tempat berkonsultasi dan bertanya terkait permasalahan-permasalahan yang menyangkut sistem pengelolaan keuangan negara yang muncul dalam pemeriksaan sehingga dapat memberikan rekomendasi yang efektif dan berkualitas.

Saudara-Saudara sekalian,

Karena masa jabatan pimpinan BPK sekarang ini akan berakhir pada bulan Oktober mendatang, acara pelantikan hari ini adalah merupakan yang terakhir yang saya lakukan sebagai Ketua BPK. Atas nama kami semua Anggota BPK Tahun 2004-09, dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Saudara-Saudara akan hal-hal yang telah kita capai selama lima tahun terakhir selama kami memimpin BPK.

Independensi dan otonomi BPK telah dapat kita pulihkan dengan diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2006. Untuk meningkatkan kemampuannya, BPK tidak saja menambah personil dan membuka kantor perwakilan di semua Ibukota Provinsi. BPK pun mengajak Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk ikut memeriksa laporan keuangan sektor negara. Keikutsertaan KAP kita awali dari pemeriksaan BUMN dan BUMD yang merupakan produsen *private goods* yang memang merupakan kebolehan dari KAP.

Sebagai auditor eksternal, kewenangan BPK hanya terbatas pada pemberian opini pemeriksaan, saran maupun rekomendasi perbaikan. Setelah menyerahkannya kepada DPR, BPK wajib mengumumkan secara luas hasil pemeriksaannya dan melaporkan dugaan penyimpangan temuannya kepada penegak hukum untuk disidik lebih lanjut. BPK sekaligus berwenang untuk memantau perbaikan sistem keuangan negara berdasarkan saran dan rekomendasi pemeriksaannya. Dilain pihak, BPK tidak memiliki kewenangan untuk membuat UU dan aturan maupun tindakan yang bersifat memaksa guna memperbaiki sistem keuangan negara itu. Berbagai jenis kewenangan yang disebut terakhir hanya diimiliki oleh Pemerintah dan DPR.

Hadirin yang saya hormati,

Berbagai kewenangan BPK yang diberikan oleh UU No. 15 Tahun 2006 telah kita maksimir secara terukur untuk ikut mempercepat implementasi ketiga UU Keuangan Negara Tahun 2003-2004. Dalam kaitan ini, BPK telah memperluas objek pemeriksaannya baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran negara. Tadinya, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, BPK hanya memeriksa sebahagian dari pengeluaran negara. BPK pun telah meningkatkan mutu pemeriksaan, saran, maupun rekomendasinya. Untuk ikut serta membangun sistem keuangan negara, BPK mewajibkan seluruh *auditees* untuk membuat dan menyerahkan *Management Representation Letter* maupun Rencana Aksi secara konkrit di berbagai bidang dengan jadwal yang jelas untuk dapat meningkatkan opini pemeriksaan laporan keuangannya UU No. 15 Tahun 2006 sekaligus memberikan kekuasaan *quasi-judicial* pada BPK dalam menghitung dan menetapkan kerugian negara.

BPK tidaklah *grusa-grusu* dalam melakukan tindakan dan menggunakan kewenangan konstitusionalnya itu. Secara perlahan, tapi pasti, BPK menyakinkan aparat penegak hukum dan pemelihara keamanan akan pentingnya peranan pemeriksaan BPK sebagai fungsi manajemen dan kontrol. Sekarang justru Dephan, TNI/POLRI, dan badan intelegen negara yang menjadi pelopor dalam perbaikan sistem keuangan negara. BUMN/BUMD strategis seperti Pertamina dan bank-bank negara semakin menyadari makna transparansi dan akuntabilitas bagi peningkatan kemampuan mereka bersaing di pasar global. Depkeu semakin

menyadari akan perlunya *Treasury Single Account*, inventarisasi aset negara serta transparansi maupun akuntabilitas dalam penerimaan pajak, PNBP, privatisasi BUMN/BUMD serta penjualan aset dan penerimaan negara dari hibah serta pinjaman. Tanpa itu, Menkeu tidak akan mengetahui bagaimana posisi keuangan negara dan tidak akan dapat meningkatkan peringkat Surat Utang Negara.

Dalam batas-batas kewenangannya, BPK memberikan bantuan kepada *auditees* yang memerlukannya bagaimana membuat Rencana Aksi. BPK pun membantu *auditees* ikut mencarikan jalan keluar untuk mengimplementasikannya. BPK ikut berperan dalam pembangunan kelembagaan guna mensukseskan reformasi sosial: demokratisasi politik, otonomi daerah, globalisasi perekonomian dan korporatisasi BUMN/BUMD. Untuk mengatasi kelangkaan SDM di kedua Provinsi di Papua, BPK telah mengajak Depdagri dan Depkeu serta berbagai universitas untuk menyelenggarakan pendidikan khusus dalam bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, BPK memberikan waktu yang memadai kepada *auditees* yang diduga melakukan penyimpangan untuk mengoreksi kesalahan dan membayar kembali kerugian negara sebelum melaporkan kasusnya kepada penegak hukum untuk dilakukan penyidikan.

Saudara-Saudara sekalian,

Seluruh prestasi yang telah kita capai selama 5 tahun terakhir ini adalah merupakan buah dari jerih payah kita semua dan terjadi karena adanya kemauan seluruh jajaran BPK untuk merubah diri, meningkatkan integritas dan kemampuan teknis pemeriksaan. Dalam 5 tahun terakhir, kita sudah berhasil memberikan contoh dan teladan sehingga *auditees* percaya pada opini pemeriksaan BPK dan bersedia mendengar saran maupun rekomendasi kita. Sudah semakin banyak instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah menyerahkan MRL dan *Action Plan*nya kepada BPK. Walaupun LKPP masih memperoleh opini *disclaimer*, sudah ada peningkatan opini pemeriksaan LKKL, termasuk bagi berbagai Departemen besar. Dalam rangka pembangunan kelembagaan, badan legislatif pun sudah menerima saran BPK untuk membentuk Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) guna semakin dapat meningkatkan perannya dalam mengawasi keuangan negara dan menjalankan hak budjetnya.

Lead by example BPK juga tercermin dari opini pemeriksaan KAP pada laporan keuangan BPK yang sudah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian maupun dari hasil reviu ARK Negeri Belanda yang menggembirakan atas kinerja BPK. Karena adanya peningkatan mutu kerja BPK, mitra kerja kita dari negara-negara lain semakin bersedia membantu BPK dalam hal penyusunan *Strategic Plan*, peningkatan mutu SDM maupun dalam kegiatan pembangunan kapasitas dibidang teknologi, kerjasama pemereiksaan maupun pertukaran pengalaman. Karena penghematan kerugian negara yang kita lakukan, Pemerintah pun telah meningkatkan anggaran BPK secara berlipat ganda, apakah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM, menambah kantor perwakilan, meningkatkan penghasilan serta melakukan modernisasi alat kerja termasuk teknologi informasi. Gabungan antara peningkatan reputasi, penghasilan dan fasilitas kerja tersebut telah memungkinkan BPK menarik tenaga-tenaga kerja yang semakin baik pula.

Saudara-Saudara sekalian,

Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat pada Saudara-saudara Pejabat Eselon I yang baru dilantik. Saya berharap agar kerangka dasar dan kebijakan yang telah kita gariskan dan lakukan selama 5 tahun terakhir dapat kiranya Saudara-Saudara pantau dan lanjutkan dimasa depan agar LKPP, seluruh LKKL maupun LKPD lebih cepat mendapatkan opini WTP dalam masa Pemerintahan Presiden SBY yang kedua, periode 2009-2014.

Selamat menjalankan tugas pada jabatan yang baru, semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua. Amin.

Selamat bekerja dan semoga berhasil baik.

***Wabillahitaufik Walhidayah,
Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Prof. Dr. Anwar Nasution